



RENCANA IMPLEMENTASI

September 2016 – Februari 2018

PROYEK KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP SEMBILANG-DANGKU (KELOLA SENDANG)

Kemitraan dalam Pengelolaan Eco-region
dan Lanskap Berkelanjutan di Sumatera Selatan

RENCANA IMPLEMENTASI
September 2016 – Februari 2018

Proyek Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku
(KELOLA SENDANG)

*Kemitraan dalam Pengelolaan Eco-region dan Lanskap
Berkelanjutan di Sumatera Selatan*

DAFTAR ISI

1	Konteks Proyek	1
2.	Tujuan dan Dampak	3
3.	Komponen Intervensi	4
4.	Pendekatan Proyek	4
5.	Fokus Wilayah	5
6.	Struktur Proyek	8
7.	Capaian Masa Persiapan	14
8.	Rencana Implementasi	16
9.	Strategi Komunikasi dan Diseminasi	26
10.	Kerangka Pemantauan dan Evaluasi	28

Lampiran:

- a. Inception Report and Implementation Plan*
- b. Kerangka Logis Proyek*
- c. Lembar Penilaian dan Mitigasi Risiko Proyek*

1. KONTEKS PROYEK

Proyek “**Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku (KELOLA SENDANG)**” yang dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh *Zoological Society of London (ZSL)* dan didukung oleh Pemerintah Inggris dan Norwegia, dirancang untuk mendukung inisiatif Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan kemitraan pengelolaan eco-region dan lanskap berkelanjutan di Sumatera Selatan, serta mengimplementasikan sebuah model kemitraan antara kepentingan produksi dan tujuan perlindungan lingkungan di dataran rendah pesisir dan lahan gambut di Sumatera Selatan. Proyek ini akan memfasilitasi dan mendukung seluruh pihak, baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat lokal, dalam mewujudkan model dan mengutamakan pendekatan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan untuk menjawab tantangan deforestasi hutan, degradasi lahan gambut, kebakaran hutan, dan dampak perubahan iklim di lanskap Sembilang-Dangku, Sumatera Selatan.

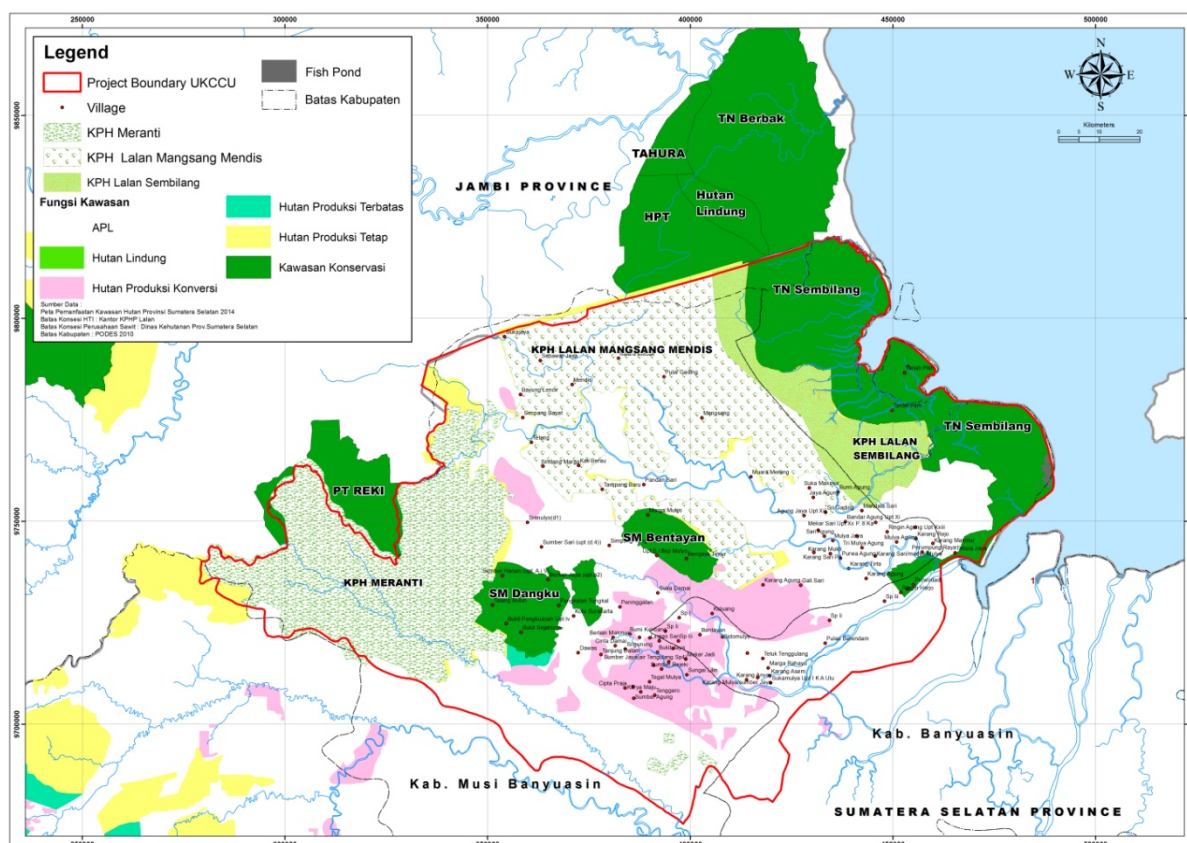
Proyek Kelola Sendang akan bekerja pada Lanskap Sembilang-Dangku, kawasan seluas sekitar satu setengah juta Ha, yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin dan meliputi DAS Banyuasin dan daerah aliran sungai yang lebih kecil lainnya yang mengalir melewati Taman Nasional Berbak-Sembilang ke arah timur, dan juga mencakup lanskap gambut prioritas di Sumatera Selatan. Lanskap ini memiliki potensi terbesar dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang dapat dicapai melalui perlindungan dan perbaikan pengelolaan kawasan hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan.

Lanskap ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama, pertama adalah bagian lanskap yang berada di sebelah utara dan timur Sungai Lalan yang didominasi oleh lahan gambut dan bakau termasuk didalamnya kawasan Taman Nasional Berbak-Sembilang. Pelaku utama sektor swasta di kawasan ini adalah APP dengan tiga kawasan konsesinya dan pihak swasta lainnya yang bekerja di kawasan konsesi hutan tanaman industri dan hutan alam, yang kesemuanya berlokasi di dalam batas pengelolaan KPH Lalan Mangsang Mendis. Terdapat pula KPH Lalan Sembilang yang berbatasan langsung dengan kawasan TN Berbak-Sembilang. Di kawasan ini juga terdapat beberapa perkebunan kelapa sawit beserta satu kawasan restorasi ekosistem (PT Global Alam Lestari), dua hutan desa, dan juga terdapat kawasan hutan yang tidak menyanggah izin dan tidak ada yang mengelola. Lanskap lahan gambut pada wilayah ini mengalami kebakaran luas pada musim kemarau tahun 2015 yang lalu.

Sementara di sebelah selatan dan barat Sungai Lalan, tanahnya didominasi oleh tanah mineral dan membentuk bagian dari ekoregion DAS dataran rendah Sumatera Selatan. Kawasan ini memiliki lebih banyak lagi perkebunan kelapa sawit, desa transmigrasi yang dibentuk sejak tahun 1980-an, dan sejumlah hutan tanaman industri yang termasuk juga konsesi APP di dalamnya. Kawasan ini juga mencakup KPH Meranti dan dua suaka margasatwa di sebelah baratnya, yakni Suaka Margasatwa Dangku dan Suaka Margasatwa Bentayan yang saat ini sudah dalam kondisi terdegradasi dan menjadi prioritas untuk pemulihan.

Masyarakat yang hidup di lanskap ini kebanyakan tinggal di sepanjang aliran sungai dan jalan raya. Kepadatan penduduk paling tinggi ditemui di kawasan yang didominasi tanah mineral di sebelah barat dan selatan Sungai Lalan. Lanskap ini secara administratif mencakup sepuluh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dan lima kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Jumlah populasi di daerah tersebut secara keseluruhan adalah sekitar 465.000 jiwa yang tinggal di 206 desa yang mencakup desa-desatradisional dan desa transmigran yang belum cukup lama terbentuk.

Gambar 1. Peta Lanskap Sembilang-Dangku



Peta dan deskripsi wilayah Lanskap Sembilang-Dangku di atas menggambarkan kompleksitas permasalahan dan pengelolaan kawasan tersebut. Pelestarian kawasan hutan dan lahan gambut, termasuk didalamnya upaya pencegahan pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan agenda prioritas Proyek ini. Pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar dan hidup bergantung pada kawasan konservasi menjadi kegiatan utama lainnya yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Penguasaan dan konversi lahan oleh masyarakat pada kawasan konservasi juga telah menjadi persoalan lain yang sama-sama dihadapi oleh Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tanggal 26 Mei 2016 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Konsorsium Pelaksana Proyek Kelola Sendang yang dipimpin oleh ZSL dengan Gubernur Sumatera Selatan yang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang juga disaksikan oleh perwakilan dari Pemerintah Norwegia dan Inggris sebagai pihak donor.

Kesepakatan tersebut meneguhkan tujuan dan kegiatan utama Proyek serta keinginan kedua belah pihak untuk bekerjasama mengembangkan kelembagaan dalam rangka mendukung Visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan, yang diharapkan akan berkontribusi kepada peningkatan kemakmuran masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi gambut dan hutan, penghindaran dan/atau pengendalian kebakaran, pengurangan deforestasi, dan penurunan emisi GRK melalui kemitraan pengelolaan lanskap secara berkelanjutan.

2. TUJUAN DAN DAMPAK

Tujuan Proyek Kelola Sendang adalah:

Pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis lahan melalui pengembangan model kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengelolaan eco-region dan lanskap berkelanjutan di Lanskap Sembilang-Dangku, Sumatera Selatan.

Dampak Proyek yang diharapkan adalah:

Tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan dan restorasi hutan dan lahan gambut serta pengakhiran deforestasi, pengeringan lahan gambut dan kebakaran hutan.

Keberhasilan capaian Proyek akan ditunjang oleh 6 Keluaran Utama Proyek yang saling menunjang dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagai berikut:

Tabel1. Tujuan, Dampak dan Keluaran Utama Proyek

Tujuan Proyek	Pengurangan emisi GRK berbasis lahan melalui pengembangan model kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengelolaan eco-region dan lanskap berkelanjutan di Lanskap Sembilang-Dangku, Sumatera Selatan.
Dampak Proyek yang Diharapkan	Tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan dan restorasi hutan dan lahan gambut serta pengakhiran deforestasi, pengeringan lahan gambut dan kebakaran hutan.
Keluaran Utama 1	Tersedianya basis data biofisik bagi pengelolaan lahan gambut dan dataran rendah, penurunan emisi GRK dan prioritas konservasi pada tingkat lanskap.
Keluaran Utama 2	Terbangunnya kebijakan dan kelembagaan serta meningkatnya kapasitas pada tingkat provinsi yang menghubungkan sektor publik dan swasta serta memungkinkan partisipasi masyarakat.
Keluaran Utama 3	Terbangunnya model pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masing-masing perusahaan dan institusi publik pengelola lahan pada tingkat lanskap dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Keluaran Utama 4	Tercapainya kejelasan status tenurial kawasan kelola masyarakat pada tingkat lanskap sebagai basis pengembangan matapencaharian masyarakat yang berkelanjutan.
Keluaran Utama 5	Teridentifikasinya peluang internasional, isu-isu kebijakan nasional dan terbagikannya petikan pembelajaran dan praktik-praktik terbaik bagi upaya pengembangan dan replikasi pengelolaan lanskap berkelanjutan pada skala yang lebih luas.
Keluaran Utama 6	Terbentuknya struktur dan mekanisme Proyek yang efektif mendukung kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan.

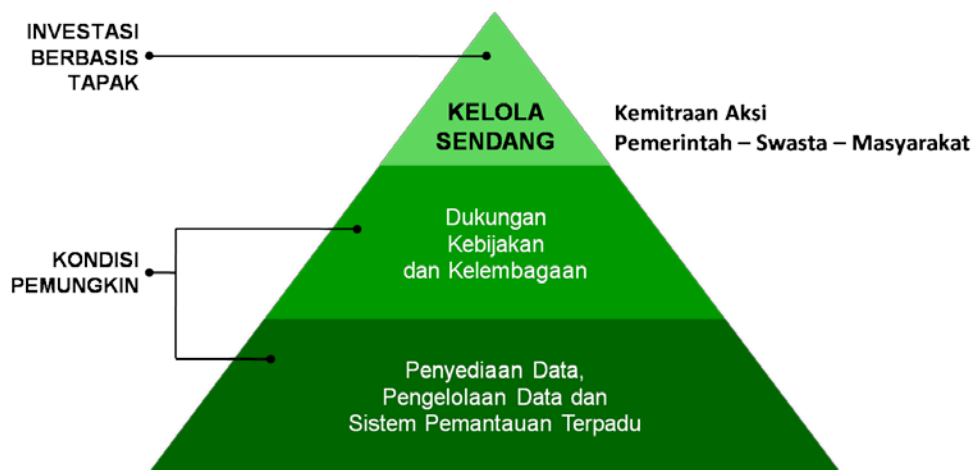
3. KOMPONEN INTERVENSI

Proyek Kelola Sendang akan memiliki dua komponen intervensi yang akan bekerja sekaligus pada tingkat kondisi pemungkin dan pada tingkat investasi berbasis tapak.

Pada tingkat kondisi pemungkin, intervensi Proyek akan dilakukan melalui: (a) penyediaan dan pengolahan data biofisik yang diperlukan untuk pengembangan model pengelolaan lahan gambut dan dataran rendah, penurunan emisi GRK dan prioritas konservasi pada tingkat lanskap, dan (b) pengembangan kebijakan dan kelembagaan serta meningkatnya kapasitas pada tingkat provinsi yang mendukung pendekatan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan.

Sedangkan pada tingkat investasi berbasis tapak, Proyek akan menentukan fokus wilayah kerja pada Lanskap Sembilang-Dangku bagi pengembangan kemitraan aksi bersama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan konsep pengelolaan lanskap yang berkelanjutan. Intervensi pada tingkat tapak akan dilakukan melalui: (a) pengembangan model pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masing-masing perusahaan dan institusi publik pengelola lahan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan (b) mendorong kejelasan status kawasan kelola masyarakat sebagai basis pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.

Gambar 2. Komponen Intervensi Proyek



4. PENDEKATAN PROYEK

Proyek Kelola Sendang merupakan proyek yang bekerja berdasarkan kepercayaan pada pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan, yang akan berusaha untuk menyediakan perangkat dan model bagi pengalokasian dan pengelolaan lahan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan dan berkelanjutan. Pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan akan memadukan kebutuhan lahan bagi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan tujuan produktif lainnya dengan tujuan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati secara seimbang dan bijaksana. Pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan akan berpusat pada perubahan perilaku manusia (*people-centered*), membutuhkan pemahaman atas fungsi lahan yang beragam, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pembaharuan klarifikasi atas hak dan kewajiban masing-masing, menuntut pola manajemen adaptif yang menghargai proses negosiasi terus menerus antara para pihak pemangku kepentingan, penguatan kapasitas seluruh pihak pemangku kepentingan dan pengembangan sistem pemantauan yang terpadu dan partisipatif.

Sementara pendekatan lanskap didasarkan atas penentuan batas lanskap dan ekosistem pada skala ruang dan wilayah tertentu berdasarkan tingkatan integritas fungsional dan kriteria ekologis-sosial tertentu, Proyek akan memadukan pendekatan lanskap tersebut dengan pendekatan yurisdiksional bagi tujuan perubahan kebijakan pada tingkat lanskap melalui peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beragam kebijakan nasional dan pendekatan kelembagaan bagi pengelolaan lanskap, antara lain: pendekatan pengelolaan DAS, pengelolaan Kesatuan Hidrologi Gambut dan pendekatan pengelolaan hutan dan kawasan konservasi termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Nasional, Suaka Margasatwa yang kesemuanya perlu dipertimbangkan dan diselaraskan dalam pengembangan model pengelolaan lanskap berkelanjutan di Sumatera Selatan. Paduan pendekatan lanskap dan pendekatan yurisdiksional akan memungkinkan model pengelolaan lahan multi-fungsi pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan negara (areal penggunaan lain atau APL) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu.

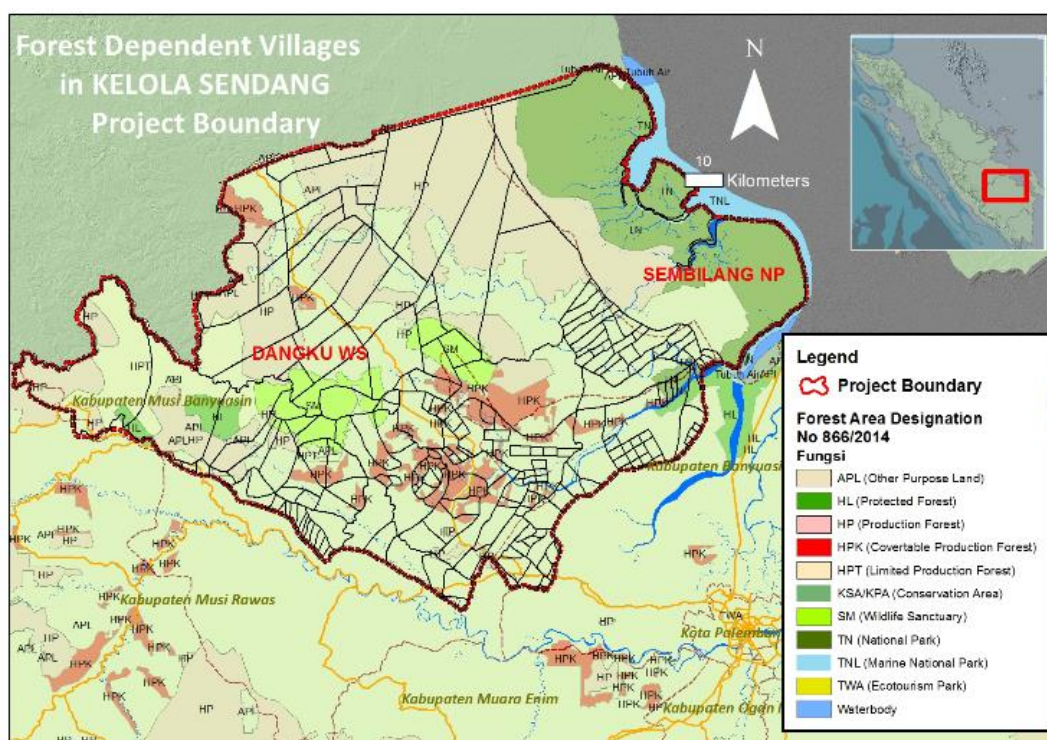
Proyek akan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan unit pelaksana di daerah terutama pada intervensi yang terkait dengan kawasan konservasi, antara lain dengan Balai Besar Taman Nasional, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan juga dengan Badan Restorasi Gambut. Sedangkan pada tingkatan provinsi, Proyek akan bekerjasama terutama dengan Bappeda Provinsi, BKSDA, Forum DAS, Tim Restorasi Gambut dan SKPD/Dinas lainnya yang terkait. Proyek akan mengembangkan keterkaitan program dengan program-program pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten sasaran Proyek yang memiliki kapasitas eksekusi pembangunan daerah dalam jangka panjang.

Dalam periode implementasi, Proyek akan mendukung Pemerintah Daerah dalam mengkonsolidasikan seluruh program dan kegiatan para pihak yang bekerja dalam lanskap yang sama ke dalam sebuah dokumen Rencana Induk Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku, yang akan menjadi basis bagi upaya pemantauan terpadu atas kemajuan pengembangan model kelola lanskap berkelanjutan sebagai bagian dari pencapaian Visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan.

5. FOKUS WILAYAH

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pada Gambar 1. Peta Lanskap Sembilang-Dangku terlihat bahwa Proyek Kelola Sendang akan bekerja pada Lanskap Sembilang-Dangku seluas sekitar satu setengah juta Ha, yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin yang meliputi DAS Banyuasin dan daerah aliran sungai yang lebih kecil lainnya. Bagian lanskap yang berada di sebelah utara dan timur Sungai Lalan didominasi oleh lahan gambut dan bakau, termasuk didalamnya kawasan Taman Nasional Berbak-Sembilang. Sementara di sebelah selatan dan barat Sungai Lalan, tanahnya didominasi oleh tanah mineral dan membentuk bagian dari ekoregion DAS dataran rendah Sumatera Selatan, didominasi perkebunan kelapa sawit dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi bahkan di kawasan Suaka Margasatwa Dangku dan Suaka Margasatwa Bentayan di bagian barat kawasan ini. Lanskap ini merupakan habitat tersisa bagi Harimau Sumatera, terutama di Taman Nasional Berbak-Sembilang dan Suaka Margasatwa Dangku, mencakup kawasan rawa gambut penting yang terancam oleh pembalakan liar, kebakaran, perambahan dan perburuan spesies yang terancam punah.

Gambar 3. Batasan Yurisdiksi Wilayah Proyek



Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan oleh Konsorsium KELOLA Sendang pada tanggal 4-10 September 2016 dan hasil diskusi dengan mitra konsorsium, maka Proyek telah menetapkan kriteria penentuan wilayah kerja sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penetapan Fokus Wilayah Proyek

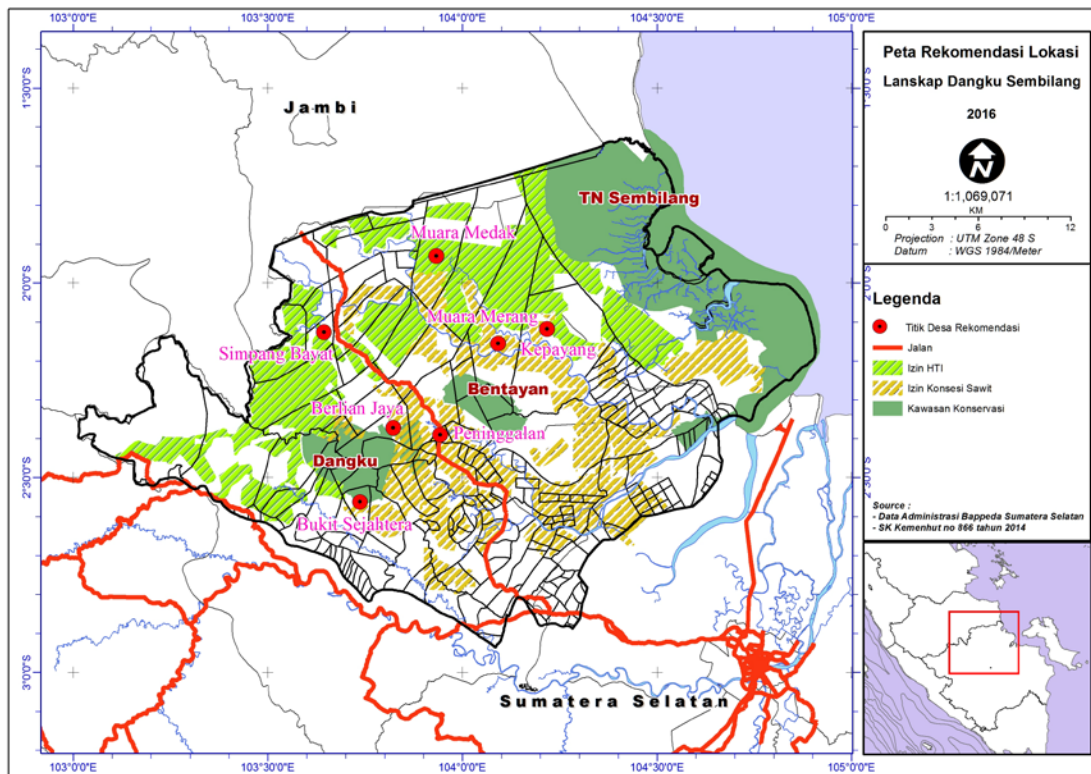
No.	Kriteria
1	Tujuan utama yang menjadi pertimbangan penentuan kriteria: - Proteksi dan restorasi Suaka Margasatwa Dangku; - Penguatan pengelolaan zona penyangga Taman Nasional Berbak-Sembilang; - Identifikasi kondisi pemungkin untuk resolusi konflik di Suaka Margasatwa Bentayan.
2	Kriteria utama: - Mendukung konservasi habitat, terutama Harimau dan Gajah Sumatera serta sistem pendukung ekosistem; - Berbatasan atau berdekatan dengan kawasan konservasi; - Adanya kesadaran dan pemahaman yang baik dari masyarakat lokal dalam mendukung kawasan konservasi dan upaya konservasi alam; - Adanya kesadaran dan pemahaman yang memadai dari sektor swasta dalam mendukung kawasan konservasi dan upaya konservasi alam; - Adanya potensi dukungan untuk terbangunnya kemitraan masyarakat-publik-swasta; - Wilayah desa dengan yurisdiksi dan status legal yang jelas; - Wilayah prioritas di wilayah KPH dan BKSDA; - Pemanfaatan lahan yang heterogen dan merefleksikan multi-stakeholder dan kepentingan; - Kemudahan akses; dan - Adanya inisiatif eksisting yang mendukung pengelolaan lanskap.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Proyek telah mengidentifikasi fokus wilayah intervensi yang akan menjadi irisan dari beberapa sektor pengelolaan lahan sebagai berikut:

Tabel 3. Irisan Wilayah Kerja per Sektor

Sektor Publik	Sektor Swasta	Sektor Masyarakat
1. Suaka Margasatwa Dangku 2. Suaka Margasatwa Bentayan 3. Taman Nasional Berbak-Sembilang 4. KPHP Lalan Mangsang Mendis 5. KPHP Meranti 6. KPHL Lalan Sembilang	1. BSS 2. MBI 3. BTS 4. PSM 5. Pinago 6. Mitra Ogan 7. SBB 8. Conoco Phillips 9. SHP 10. TPJ 11. RHM 12. Lonsum 13. WLMS 14. Job Pertamina 15. GAL 16. Makin Group 17. Raja Palma	1. Desa Berlian Jaya 2. Desa Peninggalan 3. Desa Bukit Sejahtera (SP3) 4. Desa Muara Medak (Dusun 3 dan 6) 5. Desa Kepayang 6. Desa Muara Merang (Dusun Pancuran)

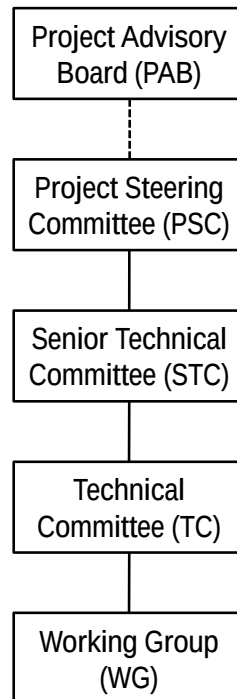
Gambar4. Peta Indikasi Fokus Wilayah Proyek



6. STRUKTUR PROYEK

Kerangka Dasar Struktur Pengelolaan Proyek Kelola Sendang telah disetujui dalam Rapat Komite Pengarah Proyek (*Project Steering Committee/PSC*) yang pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016. Kerangka dasar struktur tersebut memiliki 5 jenjang pengelolaan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 5. Kerangka Struktur Pengelolaan Proyek

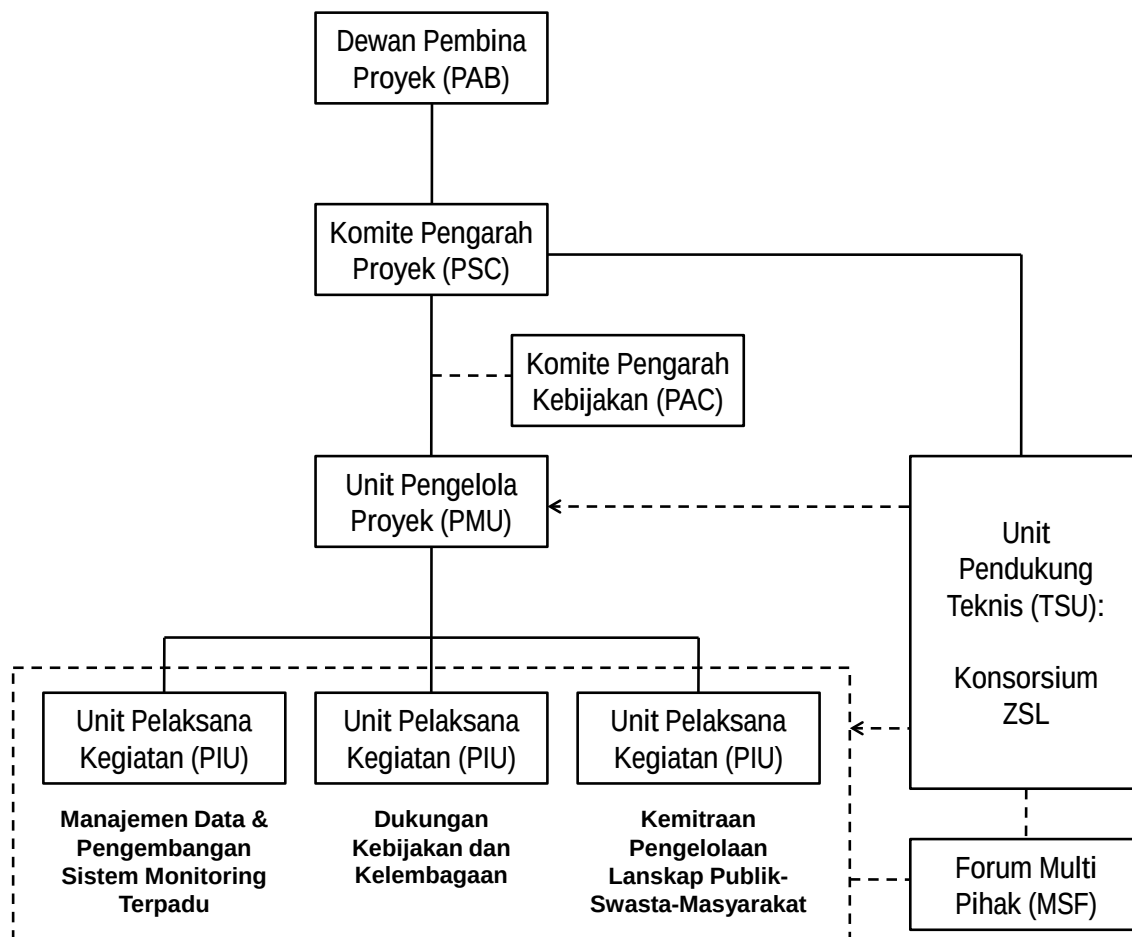


Mandat perjanjian kerja sama antara Konsorsium Pelaksana Proyek Kelola Sendang dengan Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani pada tanggal 26 Mei 2016, untuk mengembangkan kelembagaan dan mengatur lebih lanjut mengenai peran dan dukungan para pihak telah ditindaklanjuti melalui pertemuan Komite Teknis Senior yang kemudian diikuti dengan pertemuan konsultasi ke Bappeda Provinsi pada tanggal 15-16 September 2016 untuk membahas struktur, peran dan posisi masing-masing pihak dalam Proyek Kelola Sendang.

Berdasarkan Rapat Komite Teknis Senior dan konsultasi ke Bappeda Provinsi, kerangka dasar struktur pengelolaan Proyek telah lebih lanjut dikembangkan, terutama pada penambahan Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit/PMU*) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pengelolaan Proyek. Penambahan organ PMU diharapkan akan mampu mendorong Proyek berjalan secara lebih efektif dan mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi dukungan para pihak secara integratif. Perubahan yang lain adalah Komite Teknis Senior (*Senior Technical Committee*) yang terdiri dari sebagian besar Kepala Dinas SKPD terkait pada tingkat provinsi dan Kepala Bappeda di dua kabupaten sasaran Proyek, berubah posisi menjadi Komite Pengarah Kebijakan (*Policy Advisory Committee/PAC*). Sedangkan Komite Teknis (*Technical Committee*) dan Kelompok Kerja (*Working Group*) digabungkan dalam Unit Pelaksana Kegiatan (*Project Implementing Unit/PIU*). Di sisi yang lain, dukungan Konsorsium ZSL ditempatkan sebagai Unit Pendukung Teknis (*Technical Support Unit/TSU*).

Pengembangan Struktur Pengelolaan Proyek Kelola Sendang dapat disajikan sebagai berikut:

Gambar 6. Struktur Pengelolaan Proyek Kelola Sendang



Pada hasil pengembangan Struktur Pengelolaan Proyek Kelola Sendang yang disajikan diatas, tampak jelas bagaimana struktur pengelolaan Proyek perlu mengkonsolidasikan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki para pihak dibawah kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah, dimana dukungan donor dan Konsorsium ZSL ditempatkan sebagai salah satu pendukung utama Proyek. Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah sangat diperlukan mengingat bahwa Proyek Kelola Sendang ini sejatinya merupakan bentuk dukungan bagi pencapaian Visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan, ditengah begitu banyaknya dukungan dari proyek lain sejenis pada lanskap yang sama, juga dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada ragam lahan dan ragam pelaku/pengelola lahan pada Lanskap Sembilang-Dangku, serta untuk mempersiapkan sejak dini strategi keberlanjutan Proyek.

Unit Pengelola Proyek (PMU) juga diharapkan bisamemelihara jalur komunikasi dan pelaporan langsung untuk menyampaikan kemajuan dan hambatan Proyek, serta untuk mendapatkan arahan dari Dewan Pembina Proyek (PAB), dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, melalui rapat-rapat yang akan dilakukan oleh Komite Pengarah Proyek (PSC) secara periodik. PMU juga diharapkan mampu mengkoordinasikan seluruh aktivitas Unit Pelaksana Kegiatan (PIU) pada seluruh sektor dan pada tingkat kabupaten maupun provinsi.

Berikut tugas dan tanggung jawab utama per masing-masing organ dari Struktur Pengelolaan Proyek Kelola Sendang, beserta daftar keanggotaan masing-masing organ:

Dewan Pembina Proyek (*Project Advisory Board/PAB*). Merupakan organ tertinggi dalam struktur pengelolaan Proyek yang berfungsi sebagai badan pembina dan mewakili bentuk kepemimpinan pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten). PAB akan mendorong inisiatif Proyek Kelola Sendang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program tingkat kabupaten, provinsi dan nasional bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif, konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan dan restorasi hutan dan lahan gambut, dan penanggulangan kebakaran hutan yang akan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan. PAB akan melakukan fungsi pengawasan serta pemberian arahan strategis melalui Komite Pengarah Proyek (*Project Steering Committee/PSC*). PAB beranggotakan:

1. Gubernur Sumatera Selatan (bertindak sebagai Ketua PAB)
2. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
3. Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG)
4. Bupati Banyuasin
5. Bupati Musi Banyuasin

Komite Pengarah Proyek (*Project Steering Committee/PSC*). Merupakan perwakilan peran dan fungsi Dewan Pembina Proyek (*Project Advisory Board/PAB*) dalam tata kelola Proyek yang akan melakukan tugas pengawasan Proyek secara menyeluruh dan berwenang menetapkan arah serta kebijakan strategis Proyek. PSC berwenang untuk:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Induk Proyek Kelola Sendang beserta target-target pencapaian Proyek per tahunnya (*project milestones*),
- b. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Proyek,
- c. Memastikan kegiatan Proyek terkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional, lembaga donor, dan sektor swasta yang relevan selama Proyek berlangsung
- d. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan evaluasi tentang perkembangan/kemajuan Proyek.

PSC akan beranggotakan:

1. Perwakilan Gubernur Sumatera Selatan (bertindak sebagai Ketua PSC, diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim)
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3. Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA), Ditjen KSDAE, KLHK
4. Deputy Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG
5. Perwakilan donor utama (UKCCU dan Kedutaan Besar Norwegia)
6. Perwakilan dari ZSL

Komite Pengarah Kebijakan (*Policy Advisory Committee/PAC*). Merupakan komite yang sebagian besar akan terdiri dari Kepala Dinas SKPD terkait di tingkat provinsi dan Kepala Bappeda di tingkat kabupaten, berperan untuk memberikan masukan dan arah kebijakan bagi pengelolaan Proyek, sekaligus pada saat yang sama diharapkan dapat menerima umpan balik pembelajaran nyata dari Proyek sebagai dasar perbaikan/penyempurnaan dan penyusunan kebijakan daerah pendukung pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan pada masing-masing sektor terkait.

PAC akan mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau sesuai kebutuhan PMU atas arahan kebijakan PAC. PAC akan terdiri dari paling tidak (tidak terbatas pada):

1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
7. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan
8. Kepala Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang
9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II Palembang
10. Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin
11. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit/PMU*). Merupakan organ yang berfungsi sebagai koordinator dan konsolidator keseluruhan kegiatan Proyek, dan akan dipimpin oleh Tim Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. PMU akan bertugas dan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Induk Proyek Kelola Sendang beserta target-target pencapaian Proyek per tahunnya (*project milestones*), yang akan mengkonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada Lanskap Sembilang-Dangku,
- b. Menyusun rencana program kerja dan rancangan anggaran tahunan Proyek,
- c. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya tiga bulan sekali untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi perkembangan/kemajuan Proyek bersama dengan para PIU dan TSU,
- d. Mendorong terbangunnya dukungan kebijakan dan kelembagaan bagi pengelolaan Proyek,
- e. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan investasi berbasis tapak bagi kemitraan aksi pemerintah-swasta-masyarakat pada tingkat lanskap,
- f. Mengembangkan bentuk kerjasama kemitraan dan jaringan seluas-luasnya yang mendukung pencapaian tujuan Proyek,
- g. Mengelola data, informasi dan pengetahuan terkait dengan pelaksanaan Proyek secara sistematis,
- h. Mengembangkan papan/layar informasi (*dashboard*) data dan informasi Proyek yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan para pihak,
- i. Mengelola segala bentuk administrasi terkait dengan pengelolaan Proyek (surat menyurat, dokumentasi, publikasi, komunikasi, logistik, pengelolaan keuangan, dll).

PMU akan terdiri dari:

1. Koordinator PMU
2. Sekretaris Eksekutif
3. Asisten Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Asisten Kemitraan dan Jaringan dan Asisten Administrasi dan Umum

Unit Pelaksana Kegiatan (*Project Implementing Unit/PIU*). Merupakan organ pengelola Proyek yang akan melaksanakan kegiatan sehari-hari Proyek, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, yang menjalankan rencana program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Induk Proyek. PIU akan dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang Koordinator PIU yang posisinya akan diisi oleh seorang pelaksana teknis pada Dinas/SKPD yang paling terkait dengan isu/tema masing-masing PIU.

Berdasarkan proses yang iteratif, selaras dengan Rencana Induk Proyek Kelola Sendang, masing-masing PIU akan menyusun Rencana Aksi yang akan diajukan dan disetujui oleh PMU. Masing-masing PIU akan berkoordinasi lekat dan didukung oleh tim pelaksana kegiatan TSU yang terkait. Terdapat 3 isu tematik PIU pada periode awal Proyek, yaitu:

- a. PIU Manajemen Data & Pengembangan Sistem Monitoring Terpadu
- b. PIU Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan
- c. PIU Kemitraan Pengelolaan Lanskap Publik-Swasta-Masyarakat

Seiring perkembangan Proyek, akan dimungkinkan dibentuknya PIU/Sub-PIU yang bersifat lintas sektoral sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang di lapangan, dengan indikasi isu antara lain: perhutanan sosial, karhutla, gambut, dll.

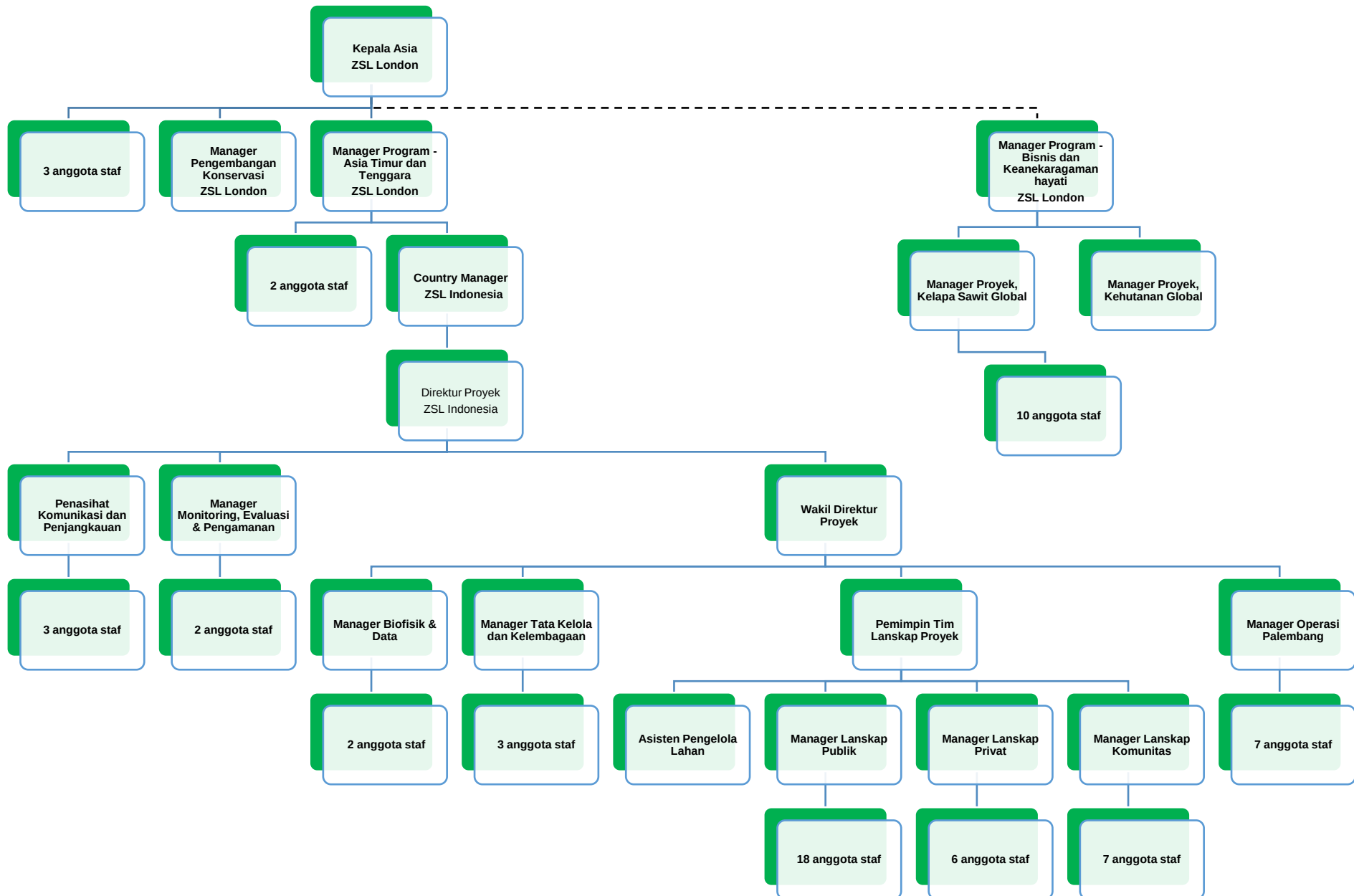
Unit Pendukung Teknis (*Technical Support Unit/TSU*). Merupakan komponen pendukung Proyek, yang secara khusus mendapatkan pendanaan dari pihak donor ataupun korporasi dan melaksanakan program/kegiatannya selaras dan sesuai dengan tujuan Proyek Kelola Sendang serta bekerja pada Lanskap Sembilang-Dangku. TSU akan memiliki struktur pengelolaan proyek tersendiri, yang akan tetap dibawah payung arahan PSC dan bekerjasama dalam pelaksanaan Proyek pada jenjang PMU dan PIU. Seperti PIU, TSU juga akan melaksanakan kegiatan sehari-hari pada tingkat tapak. TSU akan melakukan koordinasi dengan masing-masing PIU sesuai dengan isu tematik yang telah ditetapkan. Anggota TSU yang pertama kali terlibat adalah Konsorsium ZSL yang didukung oleh UKCCU dan Kedutaan Besar Norwegia. Proyek Kelola Sendang tidak menutup kemungkinan penambahan keterlibatan proyek/inisiatif sejenis dalam keanggotaan TSU, sejauh proyek/inisiatif baru tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan Proyek Kelola Sendang dan selaras dengan Rencana Induk Proyek Kelola Sendang. Pelibatan anggota TSU yang baru akan dikaji dan diusulkan PMU untuk mendapatkan pengesahan dari PSC dalam bentuk penerbitan Nota Tidak Keberatan (*No Objection Letter/NOL*).

Salah satu mandat bagi TSU adalah pengembangan Forum Multipihak (Multi Stakeholder Forum/MSF) yang akan dibentuk berdasarkan dinamika dan kebutuhan yang berkembang di lapangan. MSF akan menjadi bagian penting dari mekanisme kerja kemitraan PIU dan TSU, yang akan menjamin keterlibatan pihak perusahaan, asosiasi, pemegang izin konsesi, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, lembaga swadaya masyarakat, dan perwakilan kelompok-kelompok marjinal yang terkait (kelompok perempuan, adat dll).

Catatan Khusus: Kerangka Struktur Proyek dalam bagian ini masih dalam tahap pembahasan dengan para pihak pemangku kepentingan, khususnya dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

TSU – Konsorsium ZSL. Konsorsium Kelola Sendang dipimpin oleh ZSL dan didukung oleh beberapa mitra strategis antara lain: IDH, Deltares, Forest People Program (FPP), SNV dan Daemeter. Konsorsium ZSL akan membentuk Tim Pengelola Proyek (TPP) yang akan terdiri dari tiga tingkat struktur pengelolaan, yaitu pada tingkat ZSL London (kantor pusat ZSL), ZSL Indonesia yang berlokasi kerja di Bogor dan tingkat lapangan yang akan bekerja pada tingkat tapak sasaran Proyek dengan kantor Proyek yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan. Secara teknis, Proyek akan dipimpin oleh seorang Direktur Proyek dan dibantu oleh seorang Deputy Direktur pada tingkatan ZSL Indonesia, yang dalam kerjanya akan didukung oleh beberapa manajer dan staf yang bekerja per komponen Proyek. TPP akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana kerja Proyek, bekerjasama dengan para mitra pendukung teknis serta pemerintah pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Dangku.

Gambar 7. Struktur TSU Konsorsium ZSL



7. CAPAIAN MASA PERSIAPAN

Masa persiapan Proyek Kelola Sendang mencakup periode mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Juli/Agustus 2016. Pada periode tersebut beberapa kegiatan dan tonggak capaian yang telah berhasil diselenggarakan oleh Proyek antara lain adalah:

- a. Rapat Komite Pengarah Proyek (*Project Steering Committee/PSC*) yang pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2016. Rapat ini menyepakati beberapa hal antara lain adalah: persetujuan atas Kerangka Dasar Struktur Proyek, pemahaman atas posisi Proyek Kelola Sendang dan Kelola Sumsel, perpanjangan masa persiapan hingga bulan Juli 2016 dan penetapan jadwal tentatif bagi pertemuan Komite Teknis Senior (*Senior Technical Committee/STC*) yang pertama serta pertemuan PSC berikutnya.
- b. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Konsorsium Pelaksana Proyek Kelola Sendang yang dipimpin oleh ZSL dengan Gubernur Sumatra Selatan yang mewakili Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 26 Mei 2016, yang juga disaksikan oleh perwakilan dari Pemerintah Norwegia dan Inggris sebagai pihak donor. Kesepakatan tersebut mengatur mengenai fokus kegiatan Proyek, pola kerjasama kemitraan aksi dan mandat bagi pengembangan kelembagaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai peran dan dukungan yang dapat diberikan masing-masing pihak dalam pencapaian Visi Pertumbuhan Hijau Sumatra Selatan.
- c. Penyusunan Rencana Implementasi bersama mitra konsorsium dilakukan sepanjang bulan Juli 2016 yang kemudian diikuti dengan pertemuan konsultatif dengan pihak pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten sasaran Proyek pada tanggal 18 Agustus 2016. Pertemuan konsultasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi penting bagi penyempurnaan Rencana Implementasi, diantaranya adalah: perlunya keterpaduan gerak bagi pengembangan *One Map System* bersama dengan para pihak lainnya yang terkait dan juga dalam pengembangan sistem pemantauan terpadu, perlunya integrasi perencanaan Proyek dengan RPJMD dan perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta pentingnya memberikan pendekatan nudaya dalam rancangan pelaksanaan Proyek.
- d. Survey lapangan untuk menemukan lokasi fokus wilayah Proyek beserta kriteria penetapannya telah dilakukan oleh Tim Pengelola Proyek pada awal bulan September 2016. Survey awal tersebut didasarkan pada hasil-hasil pengambilan data awal yang telah dilakukan oleh mitra konsorsium selama bulan Februari – Juli 2016 dan hasil pemetaan dan penetapan indikatif terkini atas batas wilayah Lanskap Sembilang-Dangku. Hasil survey lapangan ini menghasilkan beberapa rekomendasi utama bagi penyempurnaan Rencana Implementasi Proyek, antara lain adalah rekomendasi untuk mengubah batasan wilayah Proyek yang semula didasarkan pada keberadaan KPH menjadi pendekatan yurisdiksi yang mencakup 5 wilayah sub-DAS di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin untuk memungkinkan perencanaan lanskap, perolehan dukungan kebijakan dan kelembagaan daerah dan penguatan kapasitas di masing-masing Pemerintah Daerah secara lebih baik. Perubahan batas wilayah Lanskap Sembilang-Dangku ini merubah luasan wilayah Proyek dari yang semula diajukan dalam proposal sebesar setengah juta Ha menjadi cakupan luasan baru sekitar 1,5 juta Ha.

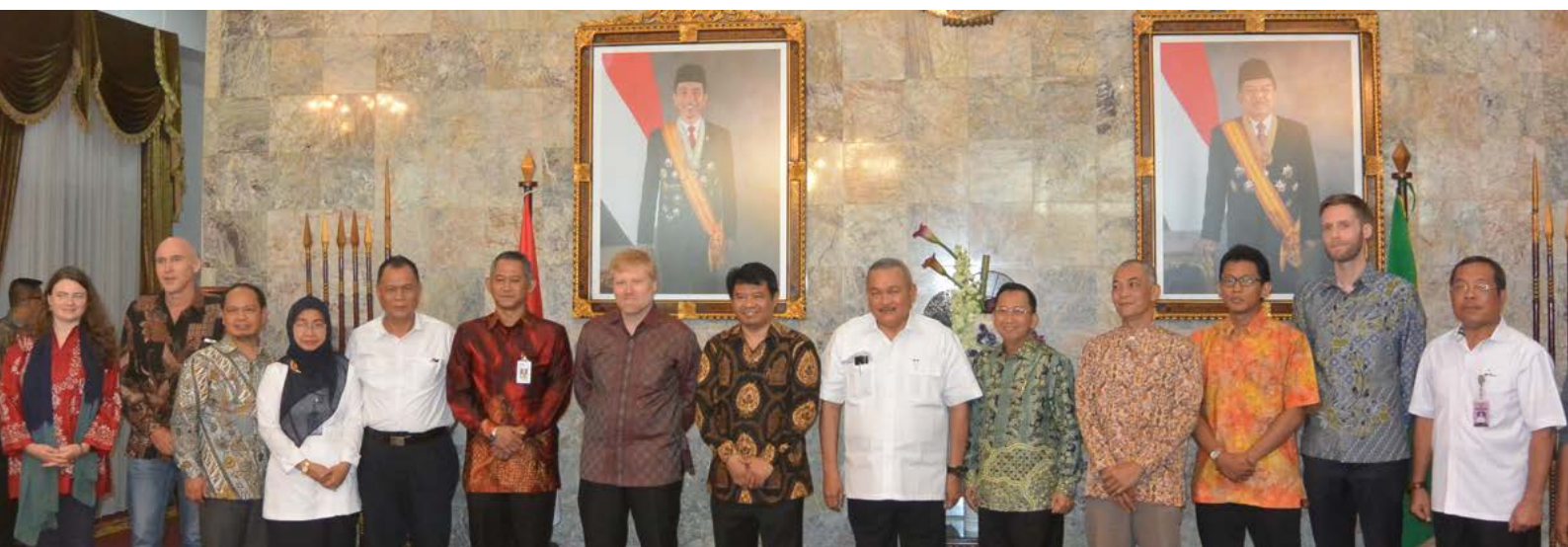
Survey juga merekomendasikan bahwa Proyek harus mentargetkan investasi berbasis tapak pada lokasi-lokasi khusus yang dapat digunakan untuk menguji-cobakan pendekatan dan strategipengelolaan lanskap berkelanjutan secara terpadu untuk memastikan bahwa Proyek memiliki sumber daya yang cukup dalam mengatasi isu-isu lintas sektoral terkait banjir,perambahan, konflik lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut dan ancaman terhadap habitat.

- e. Sebagai pelaksanaan dari mandat Rapat PSC yang pertama dan juga mandat perjanjian kerja sama antara Konsorsium Pelaksana Proyek Kelola Sendang dengan Gubernur Sumatera Selatan untuk mengembangkan kelembagaan dan mengatur lebih lanjut mengenai peran dan dukungan para pihak, telah dilaksanakan pertemuan Komite Teknis Senior (*Senior Technical Committee/STC*) yang kemudian diikuti dengan pertemuan konsultasi ke Bappeda Provinsi pada tanggal 15-16 September 2016.

Dalam pertemuan ini telah dibahas struktur, peran dan posisi masing-masing pihak dalam Proyek Kelola Sendang yang menghasilkan penambahan Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit/PMU*) yang akan berfungsi sebagai pusat koordinasi pengelolaan Proyek. Penambahan organ PMU diharapkan akan mampu mendorong Proyek berjalan secara lebih efektif dan mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi dukungan para pihak secara integratif. Disadari bahwa Proyek perlu mengkonsolidasikan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki para pihak dibawah kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah yang sangat diperlukan mengingat bahwa Proyek Kelola Sendang ini sejatinya merupakan bentuk dukungan bagi pencapaian Visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan, ditengah begitu banyaknya dukungan dari proyek lain sejenis pada lanskap yang sama, juga dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada ragam lahan dan ragam pelaku/pengelola lahan pada Lanskap Sembilang-Dangku, serta untuk mempersiapkan sejak dini strategi keberlanjutan Proyek.

- f. Proyek juga telah mengkomunikasikan dan mendiskusikan segenap perubahan dan perkembangan Proyek kepada mitra konsorsium dan pihak donor UKCCU pada tanggal 21 – 22 September 2016 yang lalu, yang sekaligus menjadi ajang terakhir bagi persiapan Rapat PSC yang kedua pada tanggal 10 Oktober 2016. Pada pertemuan ini dibahas posisi dan peran masing-masing mitra konsorsium, isu-isu administrasi Proyek dan peneguhan komitmen para pihak dalam mendukung pencapaian bersama tujuan Rencana Implementasi Proyek Kelola Sendang selama sekitar 17 bulan ke depan.

Gambar 8. Penandatanganan Nota Kesepahaman Proyek Kelola Sendang



8. RENCANA IMPLEMENTASI

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Proyek kelola Sendang akan memiliki dua komponen intervensi yang akan bekerja sekaligus pada tingkat kondisi pemungkin dan pada tingkat investasi berbasis tapak. Masing-masing kegiatan pada kedua tingkat intervensi tersebut akan mengarahkan Proyek kepada tujuan dan dampak Proyek yang akan didukung oleh 6 pilat 6 Keluaran Utama Proyek yang saling menunjang dan tidak terpisahkan satu sama lain sebagai berikut:

Rencana Implementasi Proyek Kelola Sendang periode September 2016 – Februari 2018 disusun per masing-masing Keluaran Utama Proyek sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen dan Keluaran Utama Proyek

Komponen 1	Penilaian Lanskap dan Penyusunan Prioritas Konservasi
Keluaran Utama 1	Tersedianya basis data biofisik bagi pengelolaan lahan gambut dan dataran rendah, penurunan emisi GRK dan prioritas konservasi pada tingkat lanskap.
Komponen 2	Dukungan Kebijakan dan Kelembaga Daerah
Keluaran Utama 2	Terbangunnya kebijakan dan kelembagaan serta meningkatnya kapasitas pada tingkat provinsi yang menghubungkan sektor publik dan swasta serta memungkinkan partisipasi masyarakat.
Komponen 3	Kemitraan dan Aksi pada Tingkat Lanskap: Pengelola Lahan Publik dan Swasta
Keluaran Utama 3	Terbangunnya model pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masing-masing perusahaan dan institusi publik pengelola lahan pada tingkat lanskap dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Komponen 4	Kemitraan dan Aksi pada Tingkat Lanskap: Kawasan Kelola Masyarakat
Keluaran Utama 4	Tercapainya kejelasan status tenurial kawasan kelola masyarakat pada tingkat lanskap sebagai basis pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.
Komponen 5	Peluang dan Konteks Internasional, Kebijakan Nasional dan Pembelajaran
Keluaran Utama 5	Teridentifikasinya peluang internasional, isu-isu kebijakan nasional dan terbagikannya petikan pembelajaran dan praktik-praktik terbaik bagi upaya pengembangan dan replikasi pengelolaan lanskap berkelanjutan pada skala yang lebih luas.
Komponen 6	Struktur dan Mekanisme Pengelolaan Proyek
Keluaran Utama 6	Terbentuknya struktur dan mekanisme Proyek yang efektif mendukung kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Uraian kegiatan utama beserta kerangka kerja per masing-masing Komponen Proyek akan disajikan dalam beberapa halaman berikut.

Komponen 1. Penilaian Lanskap dan Penyusunan Prioritas Konservasi

Komponen 1 merupakan intervensi Proyek untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi biofisik sebagai dasar penyusunan prioritas konservasi. Efektivitas konservasi lanskap ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan data yang kredibel dan berkualitas. Proyek Kelola Sendang memberikan perhatian pada penguatan sistem, kapasitas dan kelembagaan dalam pengelolaan data dan informasi dasar sebagai landasan untuk mengembangkan berbagai bentuk kegiatan konservasi lanskap. Untuk itu pemanfaatan sains dan teknologi dalam pengumpulan, penyusunan, penyediaan dan kompilasi data biofisik dan keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dalam Proyek.

Dengan ketersediaan data dan informasi yang kredibel dan berkualitas maka Proyek akan mampu mendukung pemerintah daerah dan para pihak untuk mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap kinerja penggunaan lahan. Hal tersebut memungkinkan Proyek untuk melakukan pengukuran terhadap indikator-indikator perubahan biofisik dan keanekaragaman hayati pada lanskap model yang ditetapkan. Berbagai faktor pengaruh terhadap tekanan terhadap lanskap seperti praktik pembalakan kayu liar, kebakaran hutan dan alih fungsi lahan akan mampu dipantau berdasarkan sistem dan mekanisme pengelolaan data yang tersedia.

Dalam kaitan dengan kebutuhan diatas maka peningkatan kapasitas pemerintah dan para pihak menjadi hal yang penting. Proyek akan memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem dan kelembagaan pengelolaan data dan informasi biofisik dan keanekaragaman hayati secara terpadu. Keterpaduan data dan informasi tersebut penting, seiring dengan agenda pemerintah dalam mewujudkan kebijakan satu peta. Kebijakan satu peta dikembangkan dalam rangka menghindari tumpang tindih dan konflik dalam pemanfaatan lahan terkait dengan perbedaan-perbedaan acuan data dan informasi yang dimiliki oleh para pihak terkait. Proyek Kelola Sendang mendukung kebijakan satu peta sebagai solusi bagi penyelesaian konflik dalam tata kelola sumberdaya alam di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 5. Kegiatan Utama Komponen 1

Keluaran Utama 1	Tersedianya basis data biofisik bagi pengelolaan lahan gambut dan dataran rendah, penurunan emisi GRK dan prioritas konservasi pada tingkat lanskap.
Kegiatan 1.1	menyediakan data biofisik yang penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan gambut dataran rendah pada target area dengan fokus pada kawasan konservasi prioritas
Sub-Kegiatan 1.1.1	Menyediakan peta tutupan dan penggunaan lahan tahun 2016 yang lengkap dan divalidasi, melengkapi data dan informasi dasar, melakukan pengawasan, dan pengkinian atribut peta pada dampak potensial wilayah bentang alam
Sub-Kegiatan 1.1.2	Melengkapi dan memvalidasi peta perluasan dan kedalaman gambut dalam wilayah Proyek
Sub-Kegiatan 1.1.3	Membangun peta model pendugaan banjir musiman
Sub-Kegiatan 1.1.4	Melengkapi dan memvalidasi peta ketinggian di wilayah Proyek dengan menggunakan LiDAR
Sub-Kegiatan 1.1.5	Pengadaan peta model pendugaan resiko kebakaran hutan dan lahan

Sub-Kegiatan 1.1.6	Melakukan proses validasi untuk mendapatkan penilaian ketelitian untuk setiap peta model yang disusun, bekerja sama dan membangun kapasitas pemerintah daerah
Kegiatan 1.2	Menetapkan model pengelolaan keanekaragaman hayati untuk menjamin pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan
Sub-Kegiatan 1.2.1	Menetapkan data dasar keanekaragaman hayati dan melanjutkan pengawasan pada bentang alam target, termasuk mengukur keberhasilan upaya konservasi
Sub-Kegiatan 1.2.2	Mengumpulkan data dan informasi dasar untuk memfasilitasi pengawasan NKT dan CKT (Cadangan Karbon Tinggi) di wilayah konsesi
Sub-Kegiatan 1.2.3	Mengumpulkan data baseline untuk memfasilitasi pemantauan yang sedang berlangsung di wilayah-wilayah lain dalam lanskap pilot di luar wilayah konsesi yang teridentifikasi. Berfokus pada wilayah konservasi yang berpotensi untuk menciptakan hubungan bagi keanekaragaman hayati atau yang dapat diperbaiki untuk tujuan ini
Sub-Kegiatan 1.2.4	Mengembangkan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan meningkatkan heterogenitas dalam bentang alam
Kegiatan 1.3	Pengembangan peta model kesesuaian penggunaan lahan
Sub-Kegiatan 1.3.1	Membuat peta kesesuaian lahan berdasarkan prinsip-prinsip green-growth yang dirancang untuk melihat area-area pertanian yang potensial
Sub-Kegiatan 1.3.2	Pemetaan hutan gambut yang potensial untuk restorasi dan rehabilitasi
Sub-Kegiatan 1.3.3	Melakukan evaluasi area konsesi untuk mendapatkan penilaian ilmiah dalam melakukan evaluasi konsesi, restorasi dan melakukan substitusi jenis komoditas lain
Sub-Kegiatan 1.3.4	Evaluasi terhadap lahan terdegradasi dan lahan tak bertuan untuk kebutuhan restorasi, rehabilitasi, dan alternatif komoditas
Kegiatan 1.4	Pengembangan sistem basis data spasial yang interaktif dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan data dan informasi
Sub-Kegiatan 1.4.1	Pengembangan sistem basis data spasial yang interaktif dan terintegrasi dengan sistem penyimpanan data dan informasi
Sub-Kegiatan 1.4.2	Pengembangan sistem MER dan SMART khusus
Sub-Kegiatan 1.4.3	Penetapan mekanisme berbagi data dan kesepakatan untuk membangun <i>One Map System</i>
Kegiatan 1.5	Penyediaan dukungan teknis dana analisis data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
Sub-Kegiatan 1.5.1	Memfasilitasi CLUP-Perencanaan Tata Guna Lahan berbasis Masyarakat di desa-desa terpilih
Sub-Kegiatan 1.5.2	Mengidentifikasi area yang rentan terhadap konflik demarkasi antara sektor swasta
Sub-Kegiatan 1.5.3	Memfasilitasi rekonstruksi batas kawasan konservasi
Sub-Kegiatan 1.5.4	Memfasilitasi rekonstruksi batas kawasan konservasi
Sub-Kegiatan 1.5.5	Menilai/meninjau rencana implementasi spasial

Komponen 2. Dukungan Kebijakan dan Kelembaga Daerah

Komponen 2 merupakan dukungan Proyek untuk memperkuat tata kelola, kebijakan dan kelembagaan pada tingkat provinsi dan kabupaten dalam rangka pengelolaan lanskap berkelanjutan. Pengelolaan lanskap berkelanjutan berkaitan dengan peran, pengaruh dan kepentingan dari para pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pendekatan lanskap bertujuan untuk mensinergikan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang menyeimbangkan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dalam suatu bentang alam. Hal tersebut hanya mampu diwujudkan dengan kemitraan para pihak dalam sebuah tata kelola yang mewadahi berbagai kepentingan aktor dan institusi di dalamnya.

Proyek Kelola Sendang mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan tata kelola, kebijakan dan kelembagaan dalam mengelola Lanskap Sembilang-Dangku. Proyek memfasilitasi terbangunnya sebuah kelembagaan sebagai landasan bagi pengelolaan lanskap secara terpadu dan berkelanjutan yang memungkinkan partisipasi luas dari para pihak kunci. Hal tersebut didukung dengan kerangka kerja legal yang menjadi basis bagi pengembangan berbagai bentuk inisiatif dalam pengelolaan lanskap. Diharapkan pengalaman tersebut menjadi sebuah model kebijakan dan tata kelola dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan di Indonesia. Terkait hal tersebut maka penguatan program dan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan lanskap dari berbagai sektor pembangunan menjadi penting untuk dilakukan, terutama terkait dengan intervensi proyek pada lanskap model yang ditetapkan. Penguatan tersebut mencakup perencanaan, pengembangan dan pemantauan berbasis yuridiksi dalam pengelolaan lanskap secara berkelanjutan. Hal tersebut penting agar intervensi proyek selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Melalui kelembagaan dan tata kelola lanskap, diharapkan akan mampu memberikan masukan dan penjamin terhadap kebijakan dan program sehingga mengarah pada tujuan pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku yang berkelanjutan.

Proyek akan mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang mengintegrasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam kerangka sistem satu peta di provinsi Sumatera Selatan. Model ini akan menjadi pembelajaran penting dan berpotensi untuk direplikasi pada daerah-daerah lain di Indonesia.

Tabel 6. Kegiatan Utama Komponen 2

Keluaran Utama 2	Terbangunnya kebijakan dan kelembagaan serta meningkatnya kapasitas pada tingkat provinsi yang menghubungkan sektor publik dan swasta serta memungkinkan partisipasi masyarakat.
Kegiatan 2.1	Membangun basis kelembagaan untuk Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Terpadu yang memungkinkan partisipasi pemangku kepentingan secara luas
Sub-Kegiatan 2.1.1	Mendukung pemerintah provinsi untuk membentuk Kemitraan Pengelolaan Ekoregion dan Lanskap (Kelola Sumsel) di tingkat provinsi
Sub-Kegiatan 2.1.2	Pengarusutamaan model Kelola Sendang dalam program kerja, kerangka kebijakan, dan instrumen peraturan badan-badan pemerintah.
Sub-Kegiatan 2.1.3	Membantu Pemerintah Sumatera Selatan untuk merancang dan membentuk forum multipihak di tingkat provinsi yang memungkinkan partisipasi para pihak utama, termasuk masyarakat untuk memberikan masukan pada Proyek

Kegiatan 2.2	Membangun model dan kerangka kebijakan sub-nasional untuk Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
Sub-Kegiatan 2.2.1	Kajian kebijakan dan perencanaan berbasis yurisdiksi yang telah teridentifikasi dan diprioritaskan pada fase awal
Sub-Kegiatan 2.2.2	Membantu dan mendukung instansi pemerintah dan pemangku kepentingan kunci lainnya untuk membangun model lanskap berkelanjutan (Master Plan) dan kerangka kebijakan sub-nasional untuk Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
Kegiatan 2.3	Memperkuat program dan kebijakan pemerintah terkait Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan dengan intervensi proyek yang selaras dengan program/kebijakan tersebut
Sub-Kegiatan 2.3.1	Bekerja dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat program pemerintah terkait Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
Kegiatan 2.4	Membangun kerangka kebijakan untuk memungkinkan integrasi dari monitoring, evaluasi dan pelaporan lanskap berkelanjutan dengan One Map System
Sub-Kegiatan 2.4.1	Bekerja dengan pemerintah provinsi untuk membentuk regulasi yang mendukung sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan (Sistem MER) yang terpadu dengan Sistem One Map System
Sub-Kegiatan 2.4.2	Membangun mekanisme untuk monitoring, evaluasi, pelaporan (MER) yang terpadu dengan One Map System melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan konsultasi dengan pemangku kepentingan utama
Sub-Kegiatan 2.4.3	Membangun kerangka pengamanan yurisdiksi (<i>jurisdictional safeguards</i>) dan mekanisme pengaduan
Sub-Kegiatan 2.4.4	Melaksanakan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait sistem manajemen, monitoring dan pelaporan data pemerintah sebagai langkah awal dalam membangun sistem MER
Kegiatan 2.5	Membangun kapasitas kelembagaan untuk replikasi
Sub-Kegiatan 2.5.1	Membuat perencanaan peningkatan kapasitas bagi untuk mitra utama pemerintah berdasarkan penilaian kesenjangan atau gap saat ini

Komponen 3. Kemitraan dan Aksi pada Tingkat Lanskap: Pengelola Lahan Publik dan Swasta

Komponen 3 merupakan intervensi Proyek untuk melibatkan berbagai stakeholder untuk memastikan adanya transparansi dan komunikasi multi-pihak dalam rangka mendukung pengelolaan lanskap berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Melalui proses kolaborasi tersebut diharapkan akan memungkinkan untuk mengembangkan kegiatan percontohan dengan pemerintah daerah dan perusahaan pada area sasaran.

Dalam hal tersebut maka Proyek Kelola Sendang mengembangkan proses-proses penguatan kapasitas dan panduan pengelolaan yang mendorong perusahaan agar mampu menerapkan praktik-praktik berkelanjutan yang memberikan dampak bagi kelestarian lanskap. Kemitraan tersebut dilakukan melalui pendekatan formal dan informal dalam berbagai bentuk proses untuk memastikan terbangunnya kerjasama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah model pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Proyek Kelola Sendang melihat pentingnya membangun sinergi dengan pemegang kebijakan daerah seperti satuan kerja pemerintah daerah seperti Bappeda, BLH, dan dinas-dinas terkait pada tingkat provinsi dan kabupaten, unit kerja pemerintah pusat di daerah seperti BPN, BKSDA, Taman Nasional Berbak=Sembilang, KPH dan lain sebagainya untuk mengembangkan sinergi dan bentuk-bentuk inisiatif dalam rangka pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku yang berkelanjutan.

Tabel 7. Kegiatan Utama Komponen 3

Keluaran Utama 3	Terbangunnya model pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di masing-masing perusahaan dan institusi publik pengelola lahan pada tingkat lanskap dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
Kegiatan 3.1	Menetapkan dan menggambarkan kegiatan dan batas wilayah percontohan
Sub-Kegiatan 3.1.1	Mengidentifikasi wilayah percontohan potensial dalam batas lanskap
Sub-Kegiatan 3.1.2	Verifikasi lapangan wilayah percontohan terhadap risiko dan peluang
Kegiatan 3.2	Perencanaan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
Sub-Kegiatan 3.2.1	Menyusun & menganalisa rencana dan penilaian lingkungan dari pemerintah, sektor swasta dan/atau perusahaan induk
Sub-Kegiatan 3.2.2	Memberikan saran, pendapat dan layanan peningkatan kapasitas untuk perencanaan
Sub-Kegiatan 3.2.3	Merancang dan membuat kerangka acuan kerja dengan pengelola lahan sektor publik dan swasta
Kegiatan 3.3	Koordinasi perencanaan dan kegiatan wilayah-wilayah percontohan
Sub-Kegiatan 3.3.1	Bekerjasama dengan para pihak/pemangku kepentingan membuat rencana-rencana kerja untuk setiap wilayah percontohan dalam lanskap proyek
Sub-Kegiatan 3.3.2	Melaksanakan rencana-rencana kerja dalam wilayah percontohan dengan mengkoordinasikan rincian kegiatan-kegiatan tersebut dalam rencana implementasi kerja yang lebih luas, yang sesuai di setiap wilayah
Kegiatan 3.4	Memfasilitasi penguatan kapasitas & pendampingan dalam sistem monitoring lanskap
Sub-Kegiatan 3.4.1	Penguatan kapasitas dan pendampingan sektor publik
Sub-Kegiatan 3.4.2	Penguatan kapasitas dan pendampingan sektor swasta
Sub-Kegiatan 3.4.3	Koordinasi tentang penguatan kapasitas dan pendampingan untuk partisipasi masyarakat dalam lanskap
Sub-Kegiatan 3.4.4	Pengawasan SMART untuk sektor publik dan swasta
Sub-Kegiatan 3.4.5	Mengevaluasi pelatihan kapasitas yang telah dilaksanakan dan pendampingan
Kegiatan 3.5	Identifikasi kebutuhan data dan standarisasi
Sub-Kegiatan 3.5.1	Mengidentifikasi dan membakukan data yang perlu dikumpulkan dari lanskap untuk memberikan informasi pengelolaan yang efektif serta menunjukkan tingkat kemajuan pencapaian tujuan Proyek
Sub-Kegiatan 3.5.2	Membuat perangkat pengumpulan dan pengolahan data
Sub-Kegiatan 3.5.3	Membangun kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan tentang data (KPIs, peta) yang akan muncul di SPOTT

Sub-Kegiatan 3.5.4	Mendefinisikan indikator menggunakan umpan balik dari para pengelola publik dan swasta
Sub-Kegiatan 3.5.5	Mengembangkan SOP sistem penilaian berbasis performa untuk program pemantauan terpadu
Kegiatan 3.6	Meningkatkan area percontohan menjadi lanskap pilot yang lebih luas/besar
Sub-Kegiatan 3.6.1	Mereplikasi kegiatan-kegiatan untuk membuat area percontohan, TOR, monitoring dan umpan balik di area prioritas lain yang ada dalam batasan Proyek
Sub-Kegiatan 3.6.2	Berkoordinasi dengan proyek-proyek pilot lain yang berada di bawah naungan Kelola Sumsel
Kegiatan 3.7	Aksi pengelolaan lanskap, investasi dan analisis biaya-manfaat
Sub-Kegiatan 3.7.1	Menganalisis peluang investasi di dalam lanskap
Sub-Kegiatan 3.7.2	Mengidentifikasi hasil dan analisis biaya-manfaat untuk area konsesi kelapa sawit (<i>feed in SPOTT</i>)
Sub-Kegiatan 3.7.3	Menganalisis pajak dan implikasinya untuk pengelolaan lanskap
Sub-Kegiatan 3.7.4	Mengembangkan dan merancang struktur/mekanisme finansial
Sub-Kegiatan 3.7.5	Mengembangkan kasus dan insentif bisnis (berhubungan dengan kerja IDH)

Komponen 4. Kemitraan dan Aksi pada Tingkat Lanskap: Kawasan Kelola Masyarakat

Komponen 4 menekankan pentingnya dimensi pemberdayaan masyarakat yang menjadi pilar utama dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Proyek Kelola Sendang mendukung upaya untuk meletakkan landasan bagi penguatan penghidupan masyarakat dalam jangka panjang. Proyek akan memfasilitasi proses-proses peningkatan keberdayaan masyarakat dalam hal memperoleh kepastian akses terhadap sumber-sumber penghidupan serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Strategi yang dikembangkan dalam Proyek ini adalah, pertama membuka partisipasi masyarakat dalam membangun kesepakatan dengan para pihak mengenai akses terhadap sumber-sumber penghidupan. Untuk itu diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses-proses kebijakan pada tingkat lokal, sebagai upaya untuk memastikan wilayah kelola masyarakat sebagai sumber penghidupan mereka.

Kedua, seiring dengan UU No. 6 tahun 2015 tentang Desa maka terbuka peluang bagi masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan kebijakan desa untuk diarahkan dalam rangka mendukung penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan produksi berkelanjutan, praktik-praktik kelola sumberdaya alam ramah iklim, serta mempromosikan akses pasar untuk produk-produk ramah lingkungan.

Dalam konteks karakteristik sosial masyarakat desa pada Lanskap Sembilang-Dangku, proyek akan memfasilitasi pengembangan petani kelapa sawit skala kecil, karet dan agroforestri melalui penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan.

Kegiatan tersebut akan dilengkapi dengan penguatan membangun praktik-praktik percontohan dalam rangka menggerakkan pembelajaran sosial pada tingkat lokal. Proyek juga memfasilitasi penguatan kelembagaan petani dalam konteks produksi dan pemasaran yang diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan.

Tabel 8. Kegiatan Utama Komponen 4

Keluaran Utama 4	Tercapainya kejelasan status tenurial kawasan kelola masyarakat pada tingkat lanskap sebagai basis pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan.
Kegiatan 4.1	Memfasilitasi partisipasi pemanfaatan lahan tingkat desa dan pemetaan batas yang mendukung kesetaraan gender dan terhubung pada tingkat perencanaan lanskap dan kebijakan pemanfaatan lahan guna meningkatkan keamanan tenure
Sub-Kegiatan 4.1.1	Membangun kesepakatan antar pihak untuk menyelesaikan konflik yang terkait batas dan pemanfaatan lahan
Sub-Kegiatan 4.1.2	Melakukan analisis jaringan untuk menentukan pengambil keputusan dan mekanisme yang tepat untuk pengelolaan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam dalam masyarakat
Sub-Kegiatan 4.1.3	Mendorong tersusunnya perencanaan pemanfaatan lahan masyarakat
Sub-Kegiatan 4.1.4	Penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat
Sub-Kegiatan 4.1.5	Pengelolaan dan monitoring NKT 5 & 6 dalam pemanfaatan lahan masyarakat
Sub-Kegiatan 4.1.6	Pengembangan sistem monitoring dan bagi informasi berbasis masyarakat
Kegiatan 4.2	Peningkatan kapasitas dan akses keuangan agar dapat berpartisipasi dalam pilot lanskap berkelanjutan berdasarkan UU 6 tahun 2014 di desa-desa sasaran Proyek
Sub-Kegiatan 4.2.1	Pengembangan strategi masyarakat tentang SLM/PLB termasuk Program Desa Peduli Api
Sub-Kegiatan 4.2.2	Fasilitasi praktek petani PLB untuk memperbaiki produktifitas dan mempromosikan akses pasar
Kegiatan 4.3	Memfasilitasi praktik pengelolaan lanskap berkelanjutan petani kecil guna memperbaiki produktifitas dan mempromosikan akses pasar
Sub-Kegiatan 4.3.1	Mengidentifikasi dan menganalisis praktik-praktik pemanfaatan lahan petani kecil
Sub-Kegiatan 4.3.2	Memfasilitasi petani kecil dengan praktik SLM guna memperbaiki produktifitas dan mempromosikan akses pasar
Sub-Kegiatan 4.3.3	Membuat dan mengimplementasikan plot percontohan untuk agroforestri
Sub-Kegiatan 4.3.4	Membuat sistem pelacakan untuk petani kecil
Sub-Kegiatan 4.3.5	Membuat penilaian kemampuan mekanisme keuangan petani kecil
Sub-Kegiatan 4.3.6	Mengikutsertakan mitra-mitra korporat di lanskap untuk melakukan model bisnis inklusif guna memperbaiki rantai nilai petani kecil

Komponen 5. Peluang dan Konteks Internasional, Kebijakan Nasional dan Pembelajaran

Komponen 5 adalah upaya Proyek untuk mengangkat model Kelola Sendang pada tataran internasional dan nasional sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi publik secara luas. Proyek Kelola Sendang adalah sebuah model pengelolaan lanskap berkelanjutan dimana dalam praktiknya akan memberikan kontribusi bagi pembangunan hijau di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai sebuah inisiatif dalam penerapan pendekatan lanskap di Indonesia yang masih terbatas, maka pembelajaran dari proyek ini diharapkan menjadi inspirasi pembelajaran untuk proyek sejenis di Indonesia maupun negara-negara lain.

Pada tingkat nasional, pengalaman proyek diharapkan akan memberikan masukan-masukan kebijakan kepada pemerintah pusat. Masukan tidak terbatas pada substansi kebijakan namun juga pengalaman dalam konteks berbagai perangkat pendekatan dalam rangka mendorong pertumbuhan hijau di daerah. Pada tingkat internasional, proyek akan memfasilitasi penyebarluasan pengalaman proyek pada berbagai forum-forum internasional seperti Kongres Konservasi Dunia, Konferensi UNFCCC, dan berbagai konferensi lainnya. Pada intinya komponen ini mendukung pemerintah daerah dan pihak yang terkait dalam proyek untuk mengembangkan komunikasi publik dan sosialisasi pengalaman proyek secara luas.

Tabel 9. Kegiatan Utama Komponen 5

Keluaran Utama 5	Teridentifikasinya peluang internasional, isu-isu kebijakan nasional dan terbagikannya petikan pembelajaran dan praktik-praktik terbaik bagi upaya pengembangan dan replikasi pengelolaan lanskap berkelanjutan pada skala yang lebih luas.
Kegiatan 5.1	Pengembangan SPOTT untuk mendukung dan mendorong Pertumbuhan Hijau di Sumsel dan sekitarnya, dan menyebarkan pelajaran yang didapat dari proyek
Sub-Kegiatan 5.1.1	Peningkatan kerangka kerja indikator dan protokol penelitian terkait, dibandingkan dengan hasil pemantauan, pelaporan dan verifikasi terhadap kinerja dan transparansi sosial-lingkungan yang dibuat oleh produsen
Sub-Kegiatan 5.1.2	Pembuatan SPOTT Kehutanan untuk memonitor dan mengelola risiko lingkungan
Sub-Kegiatan 5.1.3	Monitor dan keterlibatan para produsen utama/kunci dalam SPOTT
Sub-Kegiatan 5.1.4	Keikutsertaan pengambil keputusan kunci sektor swasta yang dimonitor oleh SPOTT, termasuk dalam KELOLA Sendang
Sub-Kegiatan 5.1.5	Perbaikan fungsi SPOTT untuk meningkatkan dampaknya dan kompatibilitasnya terhadap lanskap dan kebutuhan-kebutuhan Proyek
Kegiatan 5.2	Eksplorasi mekanisme berbeda untuk mendukung Green Growth di Sumatera Selatan
Sub-Kegiatan 5.2.1	Validasi pendekatan yurisdiksi (komoditas seperti minyak sawit dan kertas)
Sub-Kegiatan 5.2.2	Dialog green growth dengan pemerintah lokal dan para pihak/pemangku kepentingan kunci
Sub-Kegiatan 5.2.3	Identifikasi dan pengembangan mekanisme keuangan/finansial
Kegiatan 5.3	Mempengaruhi kebijakan dan inisiatif tingkat nasional dan membagikan hasil-hasil (outcome) yang dicapai proyek di arena nasional dan internasional

Sub-Kegiatan 5.3.1	Pembuatan dan promosi pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan pemerintah
Sub-Kegiatan 5.3.2	Pengembangan dan promosi SMART dengan inisiatif publik dan swasta, dan lanskap lain (mitra HCVRN yang memungkinkan)
Sub-Kegiatan 5.3.3	Berbagi pembelajaran tentang pendekatan lanskap
Sub-Kegiatan 5.3.4	Mempublikasikan dan mempromosikan hasil-hasil kunci proyek
Sub-Kegiatan 5.3.5	Menjalin dan menjaga jaringan yang kuat baik itu dengan jurnalis lokal dan nasional guna meningkatkan keberadaan/pamor proyek
Sub-Kegiatan 5.3.6	Memamerkan kemajuan dan keberhasilan KELOLA Sendang pada khalayak luas

Komponen 6. Struktur dan Mekanisme Pengelolaan Proyek

Komponen 6 adalah intervensi Proyek untuk mengembangkan kerangka pelaporan, pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kelola Sendang. Tujuan dari kerangka pelaporan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan Proyek adalah untuk menggambarkan proses pemantauan capaian proyek secara berkala; memberikan evaluasi yang konstruktif mengenai proses dan dampak Proyek dan penyampaian laporan perkembangan Proyek.

Komunikasi dan koordinasi dikembangkan baik untuk kepentingan internal Proyek maupun dukungan bagi pemerintah daerah. Tujuan dari komunikasi dan koordinasi adalah mendukung pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bersinergi dan bermitra dengan para pemangku kepentingan baik secara teknis maupun kebijakan. Hal tersebut penting dalam rangka memfasilitasi pihak pengelola hutan di sekitar lanskap, perusahaan swasta, dan masyarakat di dalam dan sekitar Lanskap Sembilang-Dangku untuk lebih memahami situasi saat ini dan perkembangannya. Proyek akan mempromosikan peluang yang disediakan oleh pasar baru untuk jasa lingkungan, model bisnis untuk pengelolaan hutan lestari, dan bekerja dengan instansi pemerintah terkait untuk memberikan manfaat dari penerapan praktik-praktik pengelolaan hutan yang baik.

Tabel 10. Kegiatan Utama Komponen 6

Keluaran Utama 6	Terbentuknya struktur dan mekanisme Proyek yang efektif mendukung kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan.
Kegiatan 6.1	Bekerja dengan pemerintah, para mitra, dan para pihak lain guna memastikan implementasi/pelaksanaan Proyek Kelola Sendang
Sub-Kegiatan 6.1.1	Memfasilitasi koordinasi Pertemuan PSC & STC
Sub-Kegiatan 6.1.2	Memfasilitasi koordinasi Pertemuan Mitra
Kegiatan 6.2	Mengembangkan dan menjalankan sistem pemantauan, evaluasi dan pengamanan untuk mengukur pencapaian-pencapaian dan jaminan kualitas di seluruh implementasi/pelaksanaan proyek
Sub-Kegiatan 6.2.1	Melakukan survei dasar untuk tahap Implementasi/pelaksanaan
Sub-Kegiatan 6.2.2	Merumuskan Sistem Kerangka Penilaian Kegiatan Kerja (<i>Performance Appraisal Framework/PAF</i>)

Sub-Kegiatan 6.2.3	Membuat sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif
Sub-Kegiatan 6.2.4	Evaluasi jangka menengah (Mid-term evaluation)
Sub-Kegiatan 6.2.5	Evaluasi akhir (Endline evaluation)
Sub-Kegiatan 6.2.6	Membuat sistem pengamanan dan Sistem Informasi Pemantauan (<i>Monitoring Information System/MIS</i>)
Kegiatan 6.3	Melakukan serangkaian pelatihan penguatan kapasitas bagi tim Proyek dan para pihak yang terkait untuk menjalankan Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pengamanan secara efektif
Sub-Kegiatan 6.3.1	Mengembangkan perbaikan kapasitas bagi anggota tim proyek dan para pihak terkait untuk melaksanakan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pengamanan secara efektif
Sub-Kegiatan 6.3.2	Memantau implementasi/pelaksanaan program pelatihan bagi staff dan para pihak utama untuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan memang kuat untuk tujuan ilmiah serta validitas/keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan aspek-aspek lingkungan dan sosial
Kegiatan 6.4	Mengembangkan dan menyebarkanluaskan komunikasi/informasi tentang proyek ini, menyiapkan rencana pengelolaan pengetahuan dan kegiatan pembelajaran, berkoordinasi dengan komponen kegiatan-kegiatan yang lain
Sub-Kegiatan 6.4.1	Berkoordinasi dan mengelola komunikasi Proyek
Sub-Kegiatan 6.4.2	Mengadakan serangkaian kegiatan lokakarya/pelatihan untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek berkenaan dengan bahan-bahan dan publikasi komunikasi
Sub-Kegiatan 6.4.3	Mengembangkan bahan-bahan komunikasi
Sub-Kegiatan 6.4.4	Peningkatan kapasitas komunikasi internal Proyek
Sub-Kegiatan 6.4.5	Menyiapkan strategi pengelolaan pengetahuan Proyek
Sub-Kegiatan 6.4.6	Bekerja sama dengan Tim Pemantauan dan Evaluasi, mendokumentasikan pembelajaran dan menyebarluaskan informasi

9. STRATEGI KOMUNIKASI DAN DISEMINASI

Strategi komunikasi dikembangkan untuk mendorong efektivitas pencapaian tujuan Proyek Kelola Sendang dan guna menjamin keterlibatan aktif para pihak terkait dalam pelaksanaan Proyek. Strategi komunikasi akan menentukan pengembangan rencana komunikasi dan rencana diseminasi pembelajaran dan praktik terbaik Proyek kepada masyarakat luas. Strategi komunikasi yang efektif diyakini akan mampu mendorong keterlibatan, komitmen dan dukungan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Strategi Komunikasi utama yang akan digunakan dalam Proyek Kelola Sendang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman/edukasi mengenai sumber permasalahan lanskap yang kini terjadi dan pemahaman/kampanye mengenai pendekatan pengelolaan lanskap berkelanjutan yang digunakan oleh Proyek,

2. Mendorong perubahan kebijakan dan memberikan kesadaran akan perlunya perubahan pola pengelolaan penggunaan lahan sesuai pendekatan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan,
3. Mendukung penyampaian kebijakan Pemerintah Provinsi, khususnya Gubernur Sumatera Selatan dalam pencapaian Visi Pertumbuhan Hijau Sumatera Selatan,
4. Menciptakan kondisi yang memungkinkan para pemangku kepentingan mengembangkan dialog terbuka dan inklusif menuju pengelolaan lanskap yang berkelanjutan,
5. Berupaya agar seluruh organisasi yang terlibat dalam kemitraan aksi dapat bekerja sama untuk menghasilkan pembelajaran bersama secara spesifik, kontekstual, holistik dan komprehensif,
6. Melakukan upaya-upaya penguatan mekanisme dan proses partisipasi publik, melalui dengar pendapat dan konsultasi publik, liputan media dan diskusi lintas sektoral, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan (seperti LSM, lembaga pemerintah, pengguna sumber daya, wartawan, organisasi media dan sektor swasta)
7. Mendorong para pihak di atas untuk terlibat dalam jaringan komunikasi yang produktif dan memungkinkan terjadinya peningkatan kapasitas dan partisipasi para pihak pemangku kepentingan terkait,
8. Menyebarkan pencapaian dan pembelajaran Proyek, mengidentifikasi potensi scaling-up atau replikasi praktik terbaik di dalam dan ke luar wilayah sasaran Proyek.

Berdasarkan pemetaan para pemangku kepentingan seperti yang ditunjukkan pada gambar di halan berikutnya, terdapat beberapa kategori pemangku kepentingan Proyek sebagai berikut:

- a. **Pemangku Kepentingan Primer**, yaitu individu dan organisasi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan Proyek secara keseluruhan, antara lain termasuk Gubernur Sumatera Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRG, Bappeda Provinsi, Pemerintah Daerah di dua kabupaten sasaran Proyek (Bupati Musi Banyuasin dan Banyuasin), Bappeda Kabupaten, Mitra Konsorsium ZSL, sektor swasta dan masyarakat di wilayah sasaran Proyek, dan badan-badan pemerintah lainnya terkait setempat (BPN, BLH, TN, BKSDA)..
- b. **Pemangku Kepentingan Sekunder**, yaitu individu atau organisasi yang menjadi perantara dalam proses atau tidak terlibat langsung dalam Proyek, antara lain termasuk kementerian terkait lainnya seperti Bappenas dan badan-badan pemerintah lokal lainnya dalam lanskap sasaran Proyek, LSM lokal, akademisi, peneliti, dan media, terutama pihak-pihak yang memiliki pengaruh lebih rendah kepada Proyek, namun memiliki pemahaman dan keterkaitan yang baik terhadap Proyek.
- c. **Pemangku Kepentingan Eksternal**, yaitu para individu dan organisasi yang tidak memiliki pengaruh intervensi langsung atau tidak menerima dampak langsung dari Proyek tetapi mereka dapat berpotensi mendukung atau tidak mendukung Proyek, antara lain termasuk program-program lain yang bekerja dalam upaya pembangunan hijau di luar Lanskap Sembilang-Dangu.

Disadari bahwa diseminasi dan publikasi (*outreach*) informasi dan pencapaian Proyek merupakan upaya strategis Proyek dalam penggalangan dukungan para pihak dan masyarakat luas, serta merupakan upaya awal bagi pengembangan dan replikasi Proyek pada skala yang lebih luas. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Proyek diharapkan dapat menjadi komunikator yang baik untuk menginformasikan pencapaian pelaksanaan Proyek. Berikut adalah saluran komunikasi untuk diseminasi dan publikasi yang akan digunakan oleh Proyek:

- a. Media Cetak (Siaran Pers, Kisah Sukses, Brosur Faktual, Poster Informational),
- b. Penyiaran (Interaktif dan Talk-show Radio Programming, Layanan Masyarakat, televisi "Warga Jurnalisme", pelatihan kader wartawan lingkungan dan perubahan iklim, dialog antara para pemangku kepentingan dengan pihak terkait lainnya,
- c. Public Affairs Outreach dan penyelenggaraan kegiatan di tingkat masyarakat yang melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama; termasuk didalamnya inisiatif pembentukan semacam dialog 'warungkopi' sebagai media dialog masyarakat untuk berinteraksi dengan Proyek.
- d. Pengembangan Situs Web dan Media Sosial.

Keseluruhan rencana komunikasi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perubahan perilaku di antara para pihak pemangku kepentingan dan pihak sasaran Proyek. Rencana ini merupakan panduan bagi penyampaian pesan Proyek ke kelompok sasaran per segmen dan akan digunakan sebagai dasar pengembangan materi komunikasi yang relevan dan efektif, pemilihan metode yang paling tepat yang akan digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan tersebut. Pada akhirnya, strategi komunikasi ini diharapkan dapat mempromosikan kepemilikan lokal terhadap nilai-nilai dan tujuan Proyek, agar para pihak pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok sasaran Proyek nantinya mampu mengadopsi pendekatan pengelolaan lanskap yang berkelanjutan secara permanen.

10. KERANGKA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Fungsi pelaporan, pemantauan dan evaluasi Proyek akan dilakukan untuk keseluruhan kegiatan dengan membandingkan rencana dalam Kerangka Logis Proyek dan realisasi pencapaian atas indikator kinerja kunci sebagai tolok ukur penilaian. Tujuan dari kerangka pemantauan dan evaluasi Proyek Kelola Sendang adalah untuk memberikan panduan bagi proses pemantauan pencapaian Proyek secara berkala, memberikan evaluasi yang konstruktif mengenai proses, keluaran dan dampak Proyek. Kerangka pemantauan dan evaluasi Proyek juga diharapkan akan dapat menyampaikan laporan perkembangan Proyek, mengukur pencapaian Teori Perubahan dan kerangka logis Proyek, serta untuk memastikan terjadinya proses pengukuran dan penilaian yang konsisten dan akurat, serta mampu mengidentifikasi praktik terbaik dan pembelajaran yang dihasilkan.

Pelaporan Proyek dan pemantauan kemajuan akan dilaksanakan secara berkala. Laporan tertulis bulanan mengenai kegiatan dan pengeluaran akan disusun untuk lembaga donor, pelaporan lainnya dijadwalkan sebagai berikut:

- Laporan Proyek per Semester,
- Tahunan Proyek pada Desember 2016 dan Desember 2017,

- Laporan Tahun Fiskal UKCCU pada bulan Maret 2017 dan Maret 2018 (sekaligus sebagai Laporan Akhir Proyek).

Tabel 11. Gambaran Umum Kerangka Monitoring dan Evaluasi

Proses	Daerah Fokus	Pelaporan
Pemantauan	• Masukan • Keluaran • Pertanyaan pemantauan kunci	• Laporan Kemajuan Proyek Triwulan • Laporan Tahunan Proyek • Laporan Pemantauan
Evaluasi	• Penilaian dampak Proyek • Data pemantauan kebijakan nasional dan daerah • Pertanyaan evaluasi kunci	• Laporan Kemajuan Proyek Triwulan • Laporan Tahunan Proyek • Laporan Akhir Proyek • Strategi Keberlanjutan • Laporan Evaluasi Pertengahan • Laporan Evaluasi Akhir

Kemajuan proyek akan dilaporkan kepada Komite Pengarah Proyek (*Project Steering Committee/PSC*) yang akan bertemu dua kali setahun. Sebuah presentasi umum mengenai cakupan, tujuan dan kemajuan Proyek akan disajikan dalam pertemuan tersebut guna memberikan informasi selengkap mungkin bagi peserta rapat PSC yang diharapkan akan membahas, memberikan arahan dan persetujuan terhadap Laporan Proyek beserta rencana kerja dan anggaran periode berikutnya.

Pemantauan Proyek akan memastikan Proyek telah dijalankan sesuai dengan rencana masukan, keluaran dan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan akan dilakukan secara berkesinambungan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi. Proyek dapat melakukan studi pemantauan terpisah untuk memberikan informasi yang mendukung pemantauan pelaksanaan Proyek. Sedangkan evaluasi akan dilakukan untuk meninjau efisiensi dan efektivitas Proyek dalam mencapai dampak yang diharapkan, serta menilai peluang keberlanjutan Proyek.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi akan dilakukan sesuai dengan Kerangka Penilaian Kinerja (KPK) untuk Proyek yang merupakan dokumen hidup yang akan ditinjau dan diperbarui selama durasi Proyek. KPK menguraikan pertanyaan-pertanyaan monitoring kunci, Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator kegiatan, cara verifikasi (*means of verification/MoV*) serta sasaran-sasaran untuk memandu pengumpulan dan analisis data untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam fase implementasi Proyek.

Terdapat beberapa jenis evaluasi yang akan digunakan dalam mengukur dampak Proyek, sebagai berikut:

- Evaluasi Proses**, yang merupakan penilaian terhadap aspek-aspek Proyek yang berkontribusi terhadap pencapaian keluaranProyek,
- Evaluasi Berbasis Teori**, yang merupakan penilaian mengenai keberhasilan intervensi Proyek dengan menguji efektivitas mekanisme-mekanisme yang diharapkan menjadi penggerak utama tercapainya dampak Proyek,
- Evaluasi Dampak**, yang merupakan penelitian mengenai apakah dampak berjalan sesuai arah yang diharapkan dan akan meliputi informasi kontekstual untuk menguji

pengaruh-pengaruh non-proyek dan merupakan penilaian efektivitas biaya berdasarkan azas biaya dibandingkan dengan manfaat.

Pertanyaan-pertanyaan kunci berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut ketika mengembangkan perangkat untuk pengumpulan data sesuai dengan kriteria tinjauan evaluasi:

- a. **Relevansi dan Kesesuaian**, mengukur seberapa jauh Proyek sesuai dengan prioritas kebutuhan kelompok sasaran, prioritas arah pembangunan dan kebijakan nasional dan daerah dan sejauh mana terbangun kepemilikan lokal atas Proyek,
- b. **Efisiensi**, mengukur keluaran dibandingkan dengan masukan (keuangan, staf, dan waktu) dan apakah dana telah digunakan dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai hasil maksimal yang diharapkan,
- c. **Dampak dan Kontribusi pada Perubahan**, menilai dampak positif dan negatif dari Proyek, baik yang langsung dan tidak langsung, yang disengaja ataupun tidak,
- d. **Keberlanjutan**, mengidentifikasi kemungkinan intervensi Proyek dapat terus memberikan manfaat setelah periode Proyek selesai, baik pada aspek lingkungan, ekonomi maupun sosial.